



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KURNIANTARA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN
3. NHK : 167158

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.100.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 243 m2/126 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 900.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 322.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SPM SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 125 AT/SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 44.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.407.935.332



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.874.935.332
III. HUTANG	Rp.	80.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.794.935.332

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.